



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN (KABAHARKAM) POLRI**

TANGGAL 14 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 14 April 2016.
Pukul	: 13.45 WIB s/d 16.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan Presentasi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI mengenai Pelaksanaan Pengamanan Teradu di Kawasan Parlemen.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 32 orang dari 73 orang Anggota. - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI beserta jajaran. - Setjen MPR RI beserta jajaran. - Setjen DPR RI beserta jajaran - Setjen DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

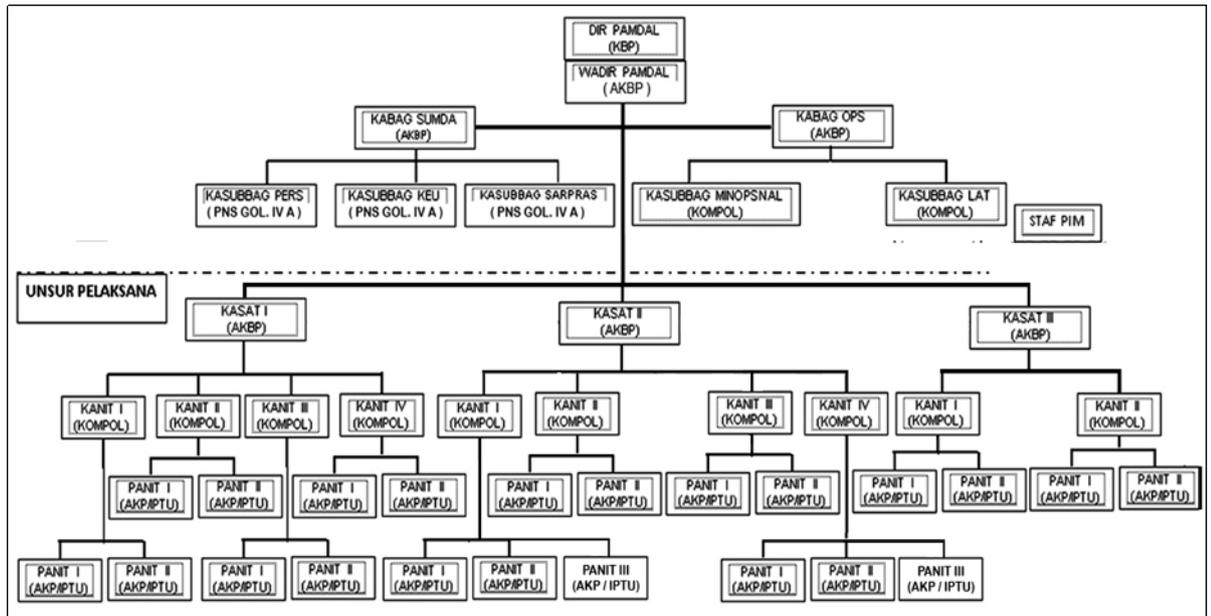
1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan Presentasi /Paparan dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri di pimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kabaharkam Polri untuk menyampaikan paparannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi/penjabaran Kabaharkam Polri terkait dengan pelaksanaan pengamanan terpadu di kawasan Parlemen sebagai berikut:
1. Adanya kerjasama antara kepolisian dengan MPR, DPR, DPD RI kami sambut dengan baik dan penuh tanggungjawab.
 2. Oleh karena itu Kepolisian dalam hal ini Kabaharkam telah menyusun suatu desain pengamanan kawasan MPR, DPR, DPD RI dan Komplek RJA.
 3. Luasnya kawasan MPR, DPR, DPD RI mencapai 38,2 Ha dan banyaknya aktifitas karyawan dan tamu yang mencapai 10 ribu orang setiap harinya, maka diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dan kuat dengan didukung teknologi.
 4. Ancaman terhadap Kegiatan lembaga negara yang terdapat di kawasan MPR, DPR, DPD RI ini bersifat sentral dan akan berdampak pada keamanan negara secara keseluruhan, adapun perkiraan ancaman dapat berupa terorisme, sabotase, narkoba, unjuk rasa, perkelahian, dll.
 5. Beberapa permasalahan di dalam Pengamanan Dalam dikawasan gedung MPR, DPR, DPD RI, antara lain :
 - a) Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang disbanding luas wilayah dan aktifitas dikawasan MPR, DPR, dan DPD RI;
 - b) Tenaga honorer dan outsourcing belum sepenuhnya memiliki kualifikasi Gada Pratama dan memiliki disiplin yang rendah;
 - c) Pemanfaatan sarana dan prasarana berbasis teknologi masih minim;
 - d) Metode pelaksanaan pengamanan di kawasan MPR, DPR, dan DPD RI dilaksanakan secara parsial.
 6. Desain pengamanan dikawasan MPR, DPR, dan DPD RI yang telah disusun Kepolisian RI sebagai berikut :
 - a) Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI akan dibagi berdasarkan zona-zona, yaitu zona merah merupakan kawasan khusus, zona kuning merupakan kawasan terbatas, dan zona hijau merupakan kawasan publik.
 - b) Setiap orang yang berada di kawasan MPR, DPR, dan DPD RI kan diberikan kartu akses zona sesuai dengan tugas dan kepentingannya.
 - c) Terhadap Sistem Pengamanan yang saat ini diterapkan dalam kawasan MPR, DPR, dan DPD RI akan diperbaharui dan ditingkatkan standar pengamanannya melalui personel, sarana dan prasarana pengamanan serta kompetensi personel.
 7. Konsep Sistem Manajemen Pengamanan untuk kawasan MPR, DPR, dan DPD RI merupakan personel gabungan dari Kepolisian RI dan juga petugas

pengamanan yang ada saat ini, adapun yang akan bertanggungjawab berasal dari Kepolisian dengan nama jabatan Direktur Pamdal.

8. Direktur Pamdal merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Sekjen dengan tugas antara lain mengkoordinir dan mengendalikan serta menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengamanan di kawasan MPR, DPR, DPD RI dan Komplek RJA.
9. Struktur organisasi yang diusulkan adalah sebagai berikut :



B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Kabaharkam, sebagai berikut :

1. Sistem yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pengamanan/ rasa aman bagi orang-orang yang berada di kawasan parlemen.
2. Diusulkan agar Kasat yang akan ditugaskan dapat berhubungan dengan kepolisian yang berada di daerah dengan tujuan membantu Anggota yang melakukan kunjungan di daerah.
3. Diharapkan petugas pengamanan dapat bekerja dengan profesional dan sesuai dengan SOP yang dijalankan. Hal tersebut agar tidak terjadi pembedaan pemeriksaan terhadap siapaun yang masuk ke lingkungan gedung MPR, DPR, dan DPD RI.
4. Diusulkan agar Anggota DPR RI yang melakukan tugas diluar gedung/daerah mendapatkan pengawalan dari Kepolisian.
5. Pengamanan yang dilakukan, kiranya dapat melingkupi pengamanan melalui udara, selain itu juga Sekretariat lembaga dapat selalu meningkatkan /upgrade teknologi pengamanannya.

6. Perlu dilakukan penghitungan/estimasi untuk biaya perawatan dan teknisi pemeliharaan terhadap teknologi pengamanan yang sudah dimiliki.
7. Diharapkan antara personel kepolisian yang ditempatkan pada lembaga-lembaga negara saling berkoordinasi dalam hal kunjungan-kunjungan yang akan dilakukan oleh Anggota lembaga.
8. Peningkatan pengamanan tidak dimaksudkan untuk membatasi masyarakat untuk berkunjung ke lingkungan parlemen, namun utk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para masyarakat sendiri.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kabaharkam dan Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 14 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001